

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERN DAN SUMBER DAYA  
MANUSIA BIDANG AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Pada SKPD di Kabupaten Tebo)**

**Oleh:**

**Anis Magfiroh**

**Pembimbing: M Rasuli dan Devi Safitri**

*Faculty Of Economics, University Of Riau, Pekanbaru, Indonesia*

Email : [magfiroh.anis99@gmail.com](mailto:magfiroh.anis99@gmail.com)

*The effect of internal control and accounting human resources sector  
of the quality Of financial statements  
(Studies in SKPD in Tebo)*

**ABSTRACT**

*This study aimed to examine the effect of internal control and human resources to the quality of local government financial reports. This research is quantitative. The population in this study section finance / accounting at SKPD in Tebo regency, where the number 26 SKPD studied. 104 questionnaires were distributed and the number of questionnaires that can be analyzed as much as 76 questionnaires. Data collection method is by distributing questionnaires. Data analysis techniques using multiple regression t test using SPSS software version 20.0. Results from this study showed that the variables of internal control and human resources in accounting affects the quality of local government financial reports. For government agencies are expected to improve the quality of performance in terms of financial management with attention and improve the quality of its human resources adequate accounting internal control in order to produce financial statements quality of local government.*

*Key words: internal control , human resources, financial reports, and government*

**PENDAHULUAN**

Saat ini tuntutan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) terus meningkat, hal ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya mempertanggungjawabkan terhadap publik adalah menyediakan informasi mengenai keuangan pemerintah secara relevan, andal dan dapat dipercaya.

Pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya

karena: (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut (Partono, 2000 dalam Nurillah).

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang No.23 Tahun 2014: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi, dimana laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

Berkaitan dengan keuangan negara pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang didalamnya mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi

pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Kemudian pemerintah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kemudian diganti dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. SAP juga merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang menjadi dasar hukum Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam kerangka koseptual akuntansi pemerintah, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah harus di diaudit oleh BPK. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Opini tersebut diberikan mengacu pada Pasal 16 ayat 1 UU No.15 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa

LHP yang akan diserahkan oleh BPK RI memuat opini atas Laporan Keuangan, Opini yang diberikan oleh BPK RI didasarkan atas:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem pengendalian intern, PP No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP dilingkungan instansi pemerintah akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik sesuai tujuan SPIP yang mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai yaitu (1) kegiatan yang efektif dan efisien, (2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan, (3) pengamanan aset negara, dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan (BPK) atas 415 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS 1 tahun 2013 menunjukkan terdapat 4.412 kasus kelemahan SPI yang meliputi:

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian

yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
3. Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Opini BPK atas LKPD keuangan daerah Kabupaten Tebo dari tahun 2008-2013 memperoleh opini WDP, ini berarti pemerintah Kabupaten Tebo belum cukup dalam memeriksa wujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. LKPD Kabupaten Tebo tahun 2013 mendapat opini WDP dikarenakan adanya aset tetap lainnya dan aset peralatan mesin tidak diketahui keberadaannya. Seperti yang dikatakan oleh perwakilan BPK RI Provinsi Jambi saat penyerahan LHP mengungkapkan adanya temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan. [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) dan ([http://www.jambi.bpk.go.id/?page\\_id=731](http://www.jambi.bpk.go.id/?page_id=731)).

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi. Sumber dayamanusia adalah aset yang

sangat bernilai dalam sebuah organisasi dalam hal ini pada pemerintahan, pegawai yang melaksanakan dan berperan dalam proses akuntansi. Dimana sumber daya manusia tersebut harus berkualitas yang menguasai pengetahuan dan kemahiran mengenai akuntansi adalah penting karena mereka menjadi pondasi penyusunan dan menyediakan laporan keuangan yang berkualitas.

Teori yang dikemukakan oleh Wahyudi (2010) menyatakan bahwa Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada, dengan adanya sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Saat ini secara bertahap pemerintah akan berpindah dari sistem akuntansi *single entry* ke *double entry* karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Selain sistem akuntansi, basis akuntansi yang diterapkan pemerintah pun kini mengalami perubahan dari berbasis kas (*cash basis*) menjadi berbasis akrual (*accrual basis*). Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan hanya sekedar teknik akuntansi semata seperti mencatat transaksi maupun menyajikan laporan keuangan, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi

yang akan digunakan, bagaimana perlakuan akuntansi untuk setiap transaksi yang terjadi, dan bagaimana menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan-kebijakan ini tidak dapat dilakukan oleh pegawai yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, oleh karena itu penempatan pegawai sebagai sumber daya manusia harus sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006 dalam Mirnayanti, 2013).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Akbar (2014) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan pengendalian internal, sedangkan Teknologi Informasi, Sumber daya manusia, Standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian Lubis (2014) Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah yang menyimpulkan kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Windiastuti (2013) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian

intern dan sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada beda responden, lokasi, waktu dan pengembangan sampel dimana pada penelitian Ruri hanya meneliti pada 1 SKPD.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (2) Apakah sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 2) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh sumber daya manusia bidang Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah**

PP No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan Laporan keuangan bahwa: Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan

keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan untuk membantu mereka dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil lebih berkualitas, (Mahmudi, 2010).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut: karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dipenuhi:

#### a. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan.

#### b. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Suatu informasi dikatakan andal apabila : a) Dapat diuji kebenarannya (*verifiabel*), b) Netral dan c) Penyajian secara wajar/jujur.

#### c. Dapat dibandingkan

Suatu informasi dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun antar entitas.

#### d. Dapat dipahami

Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dengan mudah

dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna.

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintahan berjalan dengan baik (Badjuri dan Trihapsari, 2004).

## **2. Pengendalian Intern**

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah menyatakan bahwa: Sistem pengendalian internal adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah, yang kemudiaan disingkat SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Mulyadi (2009, hal. 162) Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data

akuntansi, dan mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan pondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.

## **3. Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi**

Wiley dalam Lubis (2013) mendefinisikan Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Fontanella (2010) mengatakan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang bermanfaat, maka dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu elemen yang

sangat penting. Adanya kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan mempermudah dalam pelaksanaan fungsi akuntansi. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Sumber daya manusia adalah suatu aset yang penting bagi organisasi hal ini berarti sumber daya manusia merupakan penentu dari suatu organisasi, dalam penelitian ini sumber daya manusia fokus pada bagian akuntansi dimana SDM bagian akuntansi pada SKPD merupakan penyusun laporan keuangan yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tebo yang terletak di Provinsi Jambi dengan ibukota Muara Tebo. Dimana penelitian akan dilakukan pada pegawai bagian akuntansi/tata usaha bagian keuangan di semua SKPD di Kabupaten Tebo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

pegawai bagian akuntansi/keuangan Kabupaten Tebo. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan/akuntansi. Dimana sampel dalam penelitian ini adalah 104 pegawai. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai bagian keuangan/ akuntansi. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono,2012).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat yaitu software SPSS versi 20. Seluruh data yang sudah terkumpul ditabulasikan sesuai dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Analisis statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012).

### **2. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitastujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika pengukuran dilakukan dua kali atau lebih (Sugiyono, 2012).

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisi pada model regresi berdistribusi normal Sulyanto (2011). Pengujian ini dilakukan dengan *Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S). Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas.

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians variabel dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain. penelitian ini menggunakan metode *gletser*. Dalam uji ini, apabila hasil sig > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Pada penelitian ini, grafik *scatter plot* memiliki titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

#### c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Cara yang digunakan untuk mendekteksi ada tidaknya multikolonoeritas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF).

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi, maka dalam hal ini terdapat problem autokorelasi. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistic *Durbin Watson*.

### 4. Pengujian hipotesis

#### a. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda mempelajari variabel terikat dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas (Sulyanto 2011). Model linier berganda ini digunakan untuk menguji hipotesis. Analisis regresi linier berganda dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kualitas laporan keuangan daerah

a = konstanta

$\beta_{1,2,3}$  = koefisien regresi

$x_1$  = pengendalian intern

$x_2$  = Sumber daya manusia bidang akuntansi

e = Error

#### b. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R<sup>2</sup>* berarti  $R^2$  sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup didalam perhitungan *Adjusted R<sup>2</sup>*. Koefisien determinasi

berkisar dari 0 sampai dengan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ).

### c. Uji Statistik (t)

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel. Penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 20.00.

## HASIL PENELITIAN

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	76	35.00	55.00	46.7632	3.70438
Pengendalian intern Sumber daya manusia bidang akuntansi	76	38.00	59.00	50.2895	4.94992
Sumber daya manusia bidang akuntansi	76	39.00	60.00	51.2632	4.37072
Valid (listwise)	N 76				

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 20.0 (2015)

### Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas keseluruhan variabel dalam penelitian ini, dari semua pertanyaan yang disebar melalui kuesioner, keseluruhannya dinyatakan valid. Dan berikut adalah tabel hasil uji reliabilitas pada penelitian ini :

**Tabel 2**  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N	Nilai Kritis	Keterangan
Kualitas laporan keuangan daerah	0,801	76	0,60	Reliabel
Pengendalian intern	0,865	76	0,60	Reliabel
Sumber daya manusia bidang akuntansi	0,942	76	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil olahan data 2015

### Hasil Uji Normalitas

Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Suatu data dikatakan berdistribusi secara normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari  $\alpha 5\%$ . (Umar: 2000 dalam Lubis (2013)). Berikut tabel hasil uji normalitas data:

**Tabel 3**  
hasil uji Kolmogrov Smirnov

No.	Variabel	Assym Sig K-S
1	Kualitas Laporan Keuangan Daerah	0,170
2	Pengendalian Intern	0,405
3	Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi	0,410

Sumber: pengolahan data SPSS 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Assymp Sig Kolmogrov-Smirnov (K-S)* lebih besar dari  $\alpha 5\%$ . Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini, nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa

model regresi tersebut bebas dari multikolinieritas.

**Tabel 4**  
hasil uji multikolinieritas

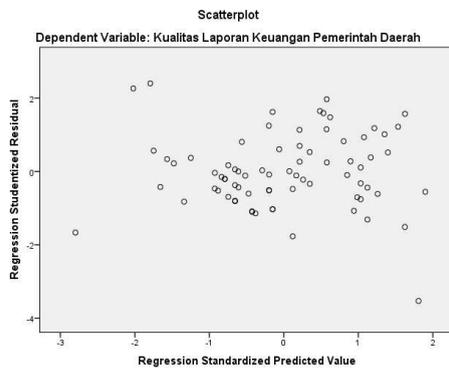
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengendalian intern	0,337	2,967
Sumber Daya Manusia bidang akuntansi	0,337	1,967

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan  
Sumber: Pengolahan Data SPSS

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini, grafik *scatter plot* memiliki titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

**Gambar 1**  
*Scatterplot*



### Hasil Uji Autokorelasi

Hasil menunjukkan nilai DW sebesar 1,569, yang berarti tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW berkisar di antara -2 sampai dengan +2.

### Hasil Analisis Berganda

Persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut:

$$Y = 13,205 + 0,263X_1 + 0,397X_2 + e$$

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan pengujian koefisien determinasi diketahui nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,599. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabelindependen terhadap variabel dependen adalah sebesar 59,9%. Sedangkan sisanya 40,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

**Tabel 5**  
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.781 <sup>a</sup>	.610	.599	2.34596

a. Predictors: (Constant), pengendalian intern, sumber daya manusia bidang akuntansi

b. Dependent Variable : kualitas laporan keuangan daerah

Sumber: Hasil Olahan Data 2015

### Hasil Uji Statistik (t)

#### a. Hasil Pengujian Hipotesis Satu ( $H_1$ )

Dari Tabel hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa variabel pengendalian intern memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,788 > 2,010$  dan  $sig.t (0,007) < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### b. Hasil Pengujian Hipotesis 2 ( $H_2$ )

Dari Tabel hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa

variabel pengendalian intern memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,717 > 2,010$  dan  $sig.t \ 0.000 < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  **$H_2$  diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan analisis data dalam pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama memperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,788,  $t_{tabel}$  sebesar 2,010 dengan nilai signifikan sebesar 0.007, dengan hasil tersebut menemukan bahwa variabel pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua memperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 3,717,  $t_{tabel}$  sebesar 2,010 dengan nilai signifikan sebesar 0.000, dengan hasil tersebut menemukan bahwa variabel sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya antara lain: penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain seperti variabel transparansi (keterbukaan) dan keakuratan dan ketersediaan sarana dan prasarana dan objek yang dipilih sebagai sampel diupayakan dan dikembangkan pada responden yang

memahami karakteristik operasional instansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Reza Ali. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Badjuri, Achmad dan Elisa, Trihapsari. 2004. *Audit kinerja pada organisasi Sektor publik Pemerintah*.
- Fontanella, Amy. 2010. *Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Dalam Jurnal Akuntansi & Manajemen, 5 (2): h: 22-30.
- LAN RI (2003), *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta
- Lubis, Nurliza. 2014. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah kota medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Erlangga.
- Mulyadi. 2010. *Auditing*. Penerbit Salemba Empa.

- Mirnayanti. 2013. *Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah daerah kabupaten majene sulawesi barat)*. universitas hasanuddin.
- Nurillah, As Syifa. 2014. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (sacd), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. Universitas Diponegoro.
- Pemerintah daerah Kabupaten Tebo, [www.Tebokab.go.id](http://www.Tebokab.go.id) di akses pada 15 Oktober 2014.
- Siaran pers, Badan pemeriksa keuangan republik indonesia Perwakilan provinsi jambi [www.jambi.bpk.go.id](http://www.jambi.bpk.go.id). Diakses pada 3 November 2014.
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika terapan-teoridan analisis dengan SPSS*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta,
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Amandemen Ke Empat, Jakarta: 2002
- Wahyudi, Johan. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pengendalian Internal Akuntansi Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi, IKIP, Mataram.
- Windiastuti, Ruri. 2013. *Pengaruh sumber daya manusi bidang akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kota Bandung)*. Universitas Widyatama.